

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tidak Pidana Penipuan. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1). Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan?. 2). Apa modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan?. 3). Mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, 2). untuk mengetahui modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan, 3). Untuk mengetahui terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, modus dan disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang di teliti maka 1). Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan yaitu a) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, b) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin membeli motor tetapi tidak memiliki uang yang cukup, c) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, 2). Modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu a) terdakwa menghubungi korban lewat media sosial yaitu facebook dan whatsapp dan juga Aplikasi TANTAN, b) Terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian bakpia, 1 unit handphone, dan 1 unit motor c) terdakwa mengajak korban berpacaran dan berjanji menikahi korban . 3). Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan a) Tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda b) independensi hakim atau kekuasaan hakim c) pertimbangan hukum hakim. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media elektronik, sehingga tidak cepat percaya dengan modus penipuan apapun yang datang, dan juga masyarakat harus lebih memahami jikalau suatu perbuatan penipuan itu di atur dalam dalam KUHP sehingga dapat dipidana. Bagi aparat penegak hukum untuk tindak pidana penipuan meliputi peningkatan kerja sama lintas instansi, peningkatan keahlian dan sarana prasarana untuk kasus siber, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memperdalam pemahaman terhadap modus-modus penipuan yang berkembang dan menggunakan pasal-pasal yang relevan, termasuk undang-undang ITE.

Kata Kunci: Penipuan, Faktor Penyebab, Disparitas putusan pengadilan

ABSTRACT

The problems studied by the author in this thesis are: 1). What factors cause the crime of fraud to occur? 2). What modes are used in committing the crime of fraud? 3). Why is there a disparity in court decisions against perpetrators of the crime of fraud? The objectives the author wished to study were: 1). To determine the causal factors of fraud, 2). To determine the modes used in committing fraud, 3). To determine the reasons for the disparity in court decisions against perpetrators of fraud. The nature of this research is descriptive, and the type of research the author used is normative research. The independent variables in this study are the causal factors, modes, and court decision disparities regarding perpetrators of the crime of fraud. The dependent variable in this study is the judge's decision regarding the perpetrators of the crime of fraud. Based on the author's research results on the five cases studied, the findings are: 1). The factors causing perpetrators to commit the crime of fraud are: a) economic factors where the defendant wants to meet their daily needs, b) economic factors where the defendant wants to buy a motorcycle but does not have enough money, c) economic factors where the defendant wants to meet life's needs with their child. 2). The modes used in committing the crime of fraud are: a) the defendant contacting the victim via social media, namely Facebook, WhatsApp, and the Tantan Application, b) the defendant inviting the victim to meet and conduct transactions for the purchase of bakpia cakes, 1 unit of a cellphone, and 1 unit of a motorcycle, c) the defendant inviting the victim to date and promising to marry the victim. 3). The disparities in court decisions against perpetrators of fraud are due to: a) different demands from public prosecutors, b) the independence or power of the judge, c) the judge's legal considerations. The author's suggestion related to this writing is for the public to be wiser in using electronic media, so as not to quickly believe any form of deception that comes their way, and the public must also better understand that the act of fraud is regulated in the Criminal Code (KUHP) so that it can be penalized. For law enforcement officials, efforts to address criminal acts of fraud include improving cross-agency cooperation, enhancing expertise and infrastructure for cyber cases, as well as conducting socialization and education to the public. In addition, it is important to deepen understanding of evolving fraud modes and use relevant articles, including the ITE Law.

Keyword: Frud, Causal Factors, Disparity in Court Rulings